

Pentahelix Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Gunung Bromo

¹Imam Sucahyo, ²Moh Mahmud, ³Jalal Ludin Fr, ⁴Isna Wardhatul Khumairoh, ⁵Tidar Astono, ⁶Nur Adinda Putri

123456 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo

Article Info

Article history:

Received : 01 February 2023

Publish : 01 March 2023

Keywords:

Pentahelix; Kebijakan pemerintah; Gunung Bromo

Abstract

Mount Bromo is a priority destination appointed by the government to become a pilot tour for other tours. Of course it is very feasible to test how good government policies are in the tourism sector. With the application of the pentahelix concept as a theory to create sustainable tourism. This research uses descriptive qualitative meaning research that focuses on objects, subjects, populations and is supported by facts in the field so as to produce data that is descriptive in nature in research. and government participation with its policies. Government policies must be in accordance with the consensus of the people on Mount Bromo, the aim is to facilitate and not cause policy overlap, both policies from the central and regional governments and customary laws that apply in the field. Of course tourism is a series of manifestations carried out by the community to provide or channel their creativity by utilizing natural resources by integrating people's habits, so with that there is tourism. The pentahelix concept and its implementation must all be sustainable; starting from the components of academia, business, community and mass media. even if there is a component that is deemed to have failed, the Pentahelix concept will not produce good tourism

Info Artikel

Article history:

Diterima : 01 Februari 2023

Publis : 01 Maret 2023

Abstrak

Gunung Bromo merupakan destinasi prioritas yang diangkat oleh pemerintah untuk menjadi wisata percontohan bagi wisata-wisata lainnya. Tentu sangatlah layak untuk menguji seberapa baik kebijakan pemerintah dalam bidang pariwisata. Dengan penerapan konsep pentahelix sebagai teori untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan *deskriptif* kualitatif artinya penelitian yang berfokus kepada objek, subjek, populasi dan didukung dengan fakta-fakta yang berada dilapangan *sehingga* menghasilkan suatu data yang sifatnya diskriptif dalam penelitian. dan partisipasi pemerintah dengan kebijakannya. Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan konsensus masyarakat yang ada di gunung bromo, tujuannya untuk memudahkan dan tidak menimbulkan timpang tindih kebijakan baik kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah dan hukum adat kebiasaan yang berlaku dilapangan. Tentu pariwisata adalah serangkaian perwujudan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memberikan atau menyalurkan kreatifitas mereka dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan mengintegrasikan kebiasaan masyarakat, maka dengan itu jadilah yang namanya pariwisata. Konsep pentahelix beserta implementasi harus berjalan dengan berkelanjutan semuanya; mulai dari komponen akademisi, bisnis, komunitas dan media massa. bahkan jika ada suatu komponen yang dirasa gagal maka konsep pentahelix tidak akan menghasilkan suatu pariwisata yang baik

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi BerbagiSerupa 4.0 Internasional](#)



Corresponding Author:

Imam Sucahyo

Universitas Panca Marga Probolinggo

Email: Semuttaspalfb557@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pentahelix adalah suatu konsep yang bertujuan untuk mensinergikan antara banyak komponen yang ada pada objek atau kawasan tertentu dengan tujuan memberikan dan memastikan kualitas

aktivitas baik fasilitas, pelayanan dan menciptakan pengalaman serta nilai manfaat bagi pariwisata. Konsep pentahelix pertama kali digegaskan oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya yang menurutnya; pariwisata adalah Industri perjalanan Indonesia bukan hanya kewajiban dari Layanan Perjalanan. Industri perjalanan Indonesia adalah kewajiban, semua sama, terutama otoritas publik, pengurusan secara ilmiah, pengelolaan keuangan, media dan daerah setempat. Energi koperasi Penta Helix adalah cara untuk menciptakan industri pariwisata di Indonesia, khususnya dalam memahami target 2016 hingga 2019. Pentahelix sebagai konsep juga sudah menjadi rujukan penting untuk diterapkan pada sektor pariwisata bahkan pengaturan tentang pentahelix sudah termaktub kedalam Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Artinya menjadi suatu legitimasi khusus untuk diterapkan diberbagai sektor. Tentu dengan diberlakukannya konsep pentahelix pada sektor pariwisata menimbulkan pertanyaan mendasar apakah dengan diberlakukannya konsep pentahelix memberikan perkembangan signifikan terhadap pertumbuhan Pariwisata khususnya di Gunung Bromo, kemudian apakah kebijakan pemerintah khususnya pemerintah pusat, daerah selaras dengan kebijakan pentahelix. Meskipun pariwisata mampu memberikan sumbangsih besar dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, bahkan dengan keanekaragam wisata yang berada di Indonesia mampu memberikan sumbangan devisa dan pemasukan Negara dalam urusan pertumbuhan ekonomi Negara yang begitu besar. Memang dalam kurun waktu 2019-2022 pertumbuhan ekonomi Negara pada sektor pariwisata sangatlah besar, hal ini umum terjadi karna masing-masing negara pasti menginginkan untuk memiliki kualitas pariwisata yang maju, dikarnakan pendapatan dari sektor pariwisata sangatlah menjanjikan. Tentu pengujian konsep pentahelix perlu untuk diuji kembali baik implemetasi penerapan sudah memenuhi target atau belum. Penelitian tentang pentahelix kebijakan pemerintah terhadap perkembangan pariwisata memang sangatlah sering dilakukan oleh para akademisi dan praktisi dengan tujuan untuk menguji seberapa efektif program-program pemerintah untuk memajukan destinasi pariwisata yang ada di Indonesia. Adapun beberapa penelitian yang kami kutip untuk memudahkan pembaca dalam memahami konsep kebijakan dan memahami program yang sudah diberlakukan diantaranya; jurnal Putri Rizkiyah, Luyusihana, Herman, dalam penelitiannya “Sinergitas Pentahelix Dalam Pemulihan Pariwisata Pasca Bencana Erupsi Gunung Api Sinabung Di Kabupaten Karo, Sumatra Utara” Penelitian ini berfokus kepada dampak erupsi terhadap kawasan moneter industri wisata yang menjadi penggerak utama perekonomian kabupaten. Selama hampir 1 (satu) dasawarsa, Sumur Sinabung terguncang letusan lahar, upaya pemulihan. meski berbagai upaya pemerintah telah dilakukan. Konsekuensi dari penelitian ini mengungkap bahwa; prosedur yang dapat dilakukan untuk membangun kembali industri perjalanan dalam Peraturan Karo, antara lain: pemulihan citra Rejim Karo sebagai lokasi wisata yang dilindungi, penguatan pembangunan kesadaran bencana, pembangunan kembali kerangka kerja, hingga menjadikan barang-barang industri perjalanan yang unggul berdasarkan wilayah, sebagai : bencana industri perjalanan, kesejahteraan industri perjalanan dan agro industri perjalanan. Fokus ini juga menggambarkan pekerjaan mana yang dapat dimainkan oleh pemerintah, komunitas ilmiah, industri, masyarakat dan media dalam setiap teknik dan proyek yang diusulkan.. Persamaan dengan peelitian ini dapat dilihat dari pengjuan konsep pentahelix sebagai kebijakan pemerintah pada sektor pariwisata, sedangkan perbedaannya terletak pada objek bencana yaitu erupsi gunung sinabung.

Dalam penelitian lain yang ditulis oleh Anak Gunung Adi Lestari, Noni Suharyati, dalam penelitiannya; “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengembangan Pariwisata” Penelitian ini berfokus pada sektor pariwisata ialah Industri perjalanan salah satu bidang utama dalam memperoleh perdagangan asing. Upaya untuk mengelola obyek wisata di beberapa daerah di Indonesia saat ini semakin berkembang, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai tempat wisata di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya; bahwa komintemen pemerintah dengan mempercepat pembangunan sektor infrastruktur pembangunan dan fasilitas wisata mampu memberikan kebijakan yang baik. Keseriusan ini dapat dilihat dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 2009

tentang Pariwisata. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pengujian kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata. Kemudian perbedaan penelitian ini khusus mengkaji tentang kebijakan tanpa melibatkan objek seperti gunung bromo. Penelitian lain yang ditulis oleh; Efra Soeda, Novie Pioh, Keseda, Penelitian yang berjudul; “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Talaud”. Penelitian ini berfokus pada optimalisasi penyelenggaraan industri wisata oleh pemerintah provinsi dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Ada serangkaian upaya untuk mengenali kombinasi dalam pemanfaatan berbagai kemungkinan aset dan cara membuat tamu tertarik pada tempat liburan. Kajian ini dimaksudkan untuk menentukan pengaturan Pemda dalam pengembangan industri perjalanan wisata di Kawasan Talaud sesuai dengan Perda No. 10 Tahun 2009 tentang Industri Perjalanan Wisata. Adapun hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya; kebijakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dengan cara mengadakan event-event baik lokal maupun nasional.

Peningkatan pesat industri pariwisata di suatu negara tentu akan mendorong kemajuan nyata dari industri perjalanan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Oleh karena itu, pengembangan strategi oleh otoritas publik sejauh hal-hal yang halal sangat diharapkan untuk membentuk kerangka kerja industri perjalanan yang menguntungkan sehingga menyenangkan bagi kedua wisatawan dan untuk daerah lokal disekitar daerah di mana industri perjalanan ditemukan. Dengan keadaan yang menguntungkan, industri perjalanan dapat memberikan hasil yang positif, misalnya, semakin banyak wisatawan yang datang sehingga lebih banyak perdagangan asing diperoleh dan lebih banyak pendukung keuangan tertarik dan berinvestasi dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini tentu saja tidak hanya bagus untuk pengembangan area industri perjalanan tetapi juga bagus untuk pengembangan di area lain seperti area keuangan, area pengembangan dan lain-lain. Akan tetapi terlepas dari pendapatan yang begitu besar, urusan pariwisata memang menjadi perhatian khusus dari pemerintah, bahkan dimasukkan kedalam *Nawacita* atau visi-misi pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua, yang berbunyi; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, artinya sektor pariwisata diharapkan menjadi percontohan perkembangan bagi sektor-sektor lainnya untuk memberikan perbaikan bagi masyarakat di Indonesia. Begitu juga kaitannya dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah contoh didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, apakah masih mengakomodir kebijakan pemerintah dalam mengatur kebijakan meskipun ada beberapa pasal yang diubah dan diatur kedalam, Peraturan Menteri Kepariwisata Nomor 18 Tahun 2016, Pasal 14 ayat 2, Pasal 15 ayat 2, dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014, Pasal 31 ayat 4, Pasal 35 ayat 2. Artinya pengaturan kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata masih perlu untuk diuji dengan melihat indikator relevansi pengaturan sesuai dengan zaman dan keselarasan dengan kebijakan daerah lainnya. Sehingga penelitian tentang pentahelix kebijakan pemerintah dalam perkembangan wisata di gunung bromo sangat perlu untuk dilakukan dengan harapan mampu memberikan *novelty* baru dalam perkembangan pariwisata yang akan datang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dekriptif kualitatif artinya dengan melihat subyektif yang membuat penggambaran secara metodis, dapat diverifikasi dan tepat tentang realitas dan kualitas terkini dari populasi atau wilayah tertentu yang digunakan sebagai objek atau subjek eksplorasi, sehingga penggambaran tersebut merupakan pemikiran tentang industri perjalanan dan dukungan pemerintah dalam strateginya. Dalam strategi ini pemeriksaan diselesaikan pada bukti pembeda masalah dan elaborasi dari informasi yang dikumpulkan dengan mengacu pada tulisan penting berkonsentrasi pada gagasan. Mewujudkan gambaran atau citra strategi pemerintah Pentahelix yang metodis, dapat diverifikasi dan tepat dalam peningkatan industri wisata di Gunung Bromo.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata di Gunung Bromo

Indonesia dibekali dengan keanekaragaman kekayaan alam yang berupa wisata-wisata yang indah diberbagai plosok negeri. Jelas itu menjadi daya tarik tersendiri untuk dijadikan sebagai objek wisata alam dan budaya. Indonesia memiliki keindahan alam dan keunikan budaya yang apabila dimanfaatkan secara optimal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dapat diartikan bahwa kepariwisataan alam dan budaya dapat ikut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Potensi wisata yang dapat dikembangkan di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada sangat beragam. Dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang sesuai dengan kegiatan kepariwisataan akan dapat tercipta beberapa objek wisata diantaranya: wisata keindahan alam, wisata lintas alam, wisata edukasi flora dan fauna, wisata air, wisata sejarah, wisata olahraga pendakian gunung, dan lain sebagainya.

Namun pada faktannya, Jaringan di sekitar objek wisata, khususnya di sekitar Gunung Bromo, adalah orang-orang yang memiliki tingkat pendidikan, bantuan pemerintah, permulaan, dan daya imajinasi yang cukup rendah. Budaya atau kebiasaan dan mentalitas pasif mempersulit individu yang terus-menerus tunduk pada kerangka ini untuk diaktifkan seiring waktu. Pemberdayaan kawasan lokal merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membangun keluhuran lapisan masyarakat yang saat ini tidak mampu melepaskan diri dari jerat kemelaratan dan keterbelakangan. Penguatan wilayah lokal sebagai upaya memberdayakan dan memerdekakan dengan cara memberdayakan, membujuk dan mengangkat persoalan sesuai dengan kemampuannya agar lebih mahir dan menarik. Jika melihat partisipasi pemerintah dengan menerbitkan pengaturan tentang Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Tentu memiliki tanggung jawab moral untuk menuntaskan secara berkesinambungan terlebih dalam Konsep ekonomi perjalanan atau kemudahan pengelolaan mulai dimanfaatkan untuk meningkatkan peluang industri wisata dikemudian hari. Terlebih lagi, rencana pengembangan berkelanjutan untuk mendapatkan keuntungan finansial, menyelamatkan budaya provinsi, dan mengamankan serta memuaskan wisatawan. Sudut moneter itu sendiri terdiri dari beberapa petunjuk termasuk promosi, peningkatan yayasan, rekonsiliasi organisasi industri perjalanan, kebebasan yang setara dan komitmen untuk semua orang dalam kemajuan industri perjalanan. Sedangkan perspektif sosial meliputi kepribadian sosial, kontribusi dinamis daerah setempat, memajukan cara pandang positif terhadap daerah setempat. Hal ini sesuai dengan tujuan otoritas publik untuk mengembangkan potensi industri perjalanan yang ada. Selain itu, pengaturan yang dikeluarkan pemerintah dengan mengkategorikan gunung bromo sebagai bagian destinasi prioritas dalam pembangunan. Sebagai salah satu bisnis fundamental, industri perjalanan memiliki komponen penting yang diberikan layanan kepada wisatawan. Ini menggabungkan atraksi, kenyamanan dan keterbukaan yang merupakan komponen paling mencolok dan dipertimbangkan saat mengunjungi tujuan industri perjalanan. Perspektif ini perlu ada untuk menarik wisatawan berkunjung ke Indonesia. Industri travel yang paling diminati di Indonesia adalah Bali, oleh karena itu untuk mengenalkan industri travel Indonesia dengan dunia sesuai arahan Presiden pada tahun 2015, Dinas Pariwisata Indonesia membuat program 10 Kebutuhan Industri Travel Objection..

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah Taman Umum utama yang ditetapkan menjadi tujuan yang sangat penting bagi Indonesia. Di bawah pengelolaan Balai Besar TNBTS, potensi yang ada saat ini akan terus diciptakan untuk menggarap kualitas dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung. Di Indonesia, kemajuan obyek industri travel masih dipegang teguh oleh otoritas publik, namun kemajuan tersebut belum memberikan pengaruh yang besar. Di zaman yang serba maju seperti sekarang ini, tentunya semua orang memanfaatkan internet untuk mendapatkan sesuatu. Tidak terkecuali di bidang industri travel dimana masyarakat akan terkena dampak dari hasil survey yang diberikan oleh wisatawan yang pernah berkunjung ke tempat tersebut secara nyata. *Electronic Word Of Mouth* (EWOM). Dengan menggunakan EWOM, masyarakat umum dapat mengetahui ulasan, foto, lokasi hingga biaya paket perjalanan

tempat wisata. Memberikan survei melalui EWOM memiliki efek yang lebih luas karena cenderung dilihat secara efektif oleh siapa saja dari berbagai tempat yang lebih baik. Survei yang bagus dapat menarik wisatawan untuk tetap bersama industri perjalanan. Bukan hanya audit hebat yang bisa dilakukan di dunia maju, tapi survei mengerikan sehingga trik bisa disebarakan tanpa masalah. Survei yang buruk penting karena dapat menjadi penilaian tentang hal-hal apa yang harus diperbaiki di kemudian hari untuk mengembangkan industri perjalanan. Meskipun demikian, yang harus diharapkan dan dibunuh adalah penipuan atau informasi palsu. Kehadiran tempat-tempat tersebut bisa membuat ulasan yang sebenarnya tidak ada, namun akan sangat menarik bagi wisatawan yang ingin mengunjungi dan mengetahuinya. Artinya sejauh ini fakta pengaturan yang berkaitan langsung dengan objek pariwisata seperti gunung bromo, ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang efektif jika diukur berdasarkan indikator daya tarik wisatawan terhadap gunung bromo. Fakta ini dikuatkan dengan jumlah wisatawan dalam kurun waktu 2016-2022, yang cenderung meningkat. Sebelum dan sesudah adanya kebijakan pengaturan tentang destinasi prioritas oleh pemerintah Jika merujuk kepada definisi istilah kebijakan adalah kegiatan yang mendorong tujuan individu, kelompok atau pemerintah dalam iklim tertentu mengenai adanya hambatan tertentu sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan atau memahami tujuan yang ideal. Sementara itu, dalam penilaian lain, strategi pemerintah dapat diartikan sebagai setiap pilihan yang diambil oleh pemerintah atau penyelenggara negara terhadap jabatan yang dipimpinya (presiden, pejabat, wakil pemimpin, pejabat/ketua kota, dan sebagainya) dalam sistem penyelesaian. elemen umum pemerintahan dan peningkatan, untuk menaklukkan pergantian peristiwa tertentu. atau di sisi lain mencapai tujuan tertentu untuk melaksanakan hasil pilihan atau peraturan dan pedoman yang masih mengudara dan biasanya diteruskan sebagai pilihan formal. Dengan mengkonsep ulang strategi dalam tajuk yang layak, maka akan menjadikan industri travel yang memiliki daya tarik tersendiri. Sehingga dengan strategi-strategi yang baik sesuai pedoman dan kesepakatan wilayah lokal yang ada di Gunung Bromo, maka kemajuan industri travel akan berjalan dengan baik dan rutin.

Kebijakan harus sesuai dengan konsensus masyarakat yang ada di gunung bromo, tujuannya untuk memudahkan dan tidak menimbulkan timpang tindih kebijakan baik kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah dan hukum adat kebiasaan yang berlaku dilapangan. Seperti yang dikatakan oleh swarbroke dalam definisinya tentang pengembangan bahwasanya; Peningkatan industri pariwisata adalah perkembangan upaya untuk mengenali campuran dalam pemanfaatan berbagai aset industri perjalanan yang mengoordinasikan semua jenis sudut pandang di luar industri perjalanan yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kesesuaian industri perjalanan. Ada beberapa bagian perbaikan, yaitu: Umumnya dengan alasan lain, membangun objek wisata di tempat-tempat yang belum lama digunakan sebagai objek wisata; Keberatan baru, membangun atraksi pada destinasi yang baru-baru ini dimanfaatkan sebagai atraksi; Kemajuan yang sama sekali berbeda dari atraksi yang ada bekerja untuk menarik lebih banyak tamu dan memungkinkan apresiasi untuk mencapai pasar yang lebih luas, dengan memperoleh sepotong kue baru; Peningkatan baru di atraksi yang ada mengarah ke pengembangan lebih lanjut kantor tamu atau mengharapakan pengeluaran opsional yang diperluas oleh tamu; dan Produksi latihan baru atau fase latihan yang bergerak mulai dari satu tempat kemudian ke tempat berikutnya dimana latihan ini membutuhkan perubahan struktur dan struktur.

Implementasi Konsep Pertahelix Dalam Pengembangan Pariwisata di Gunung Bromo

Peraturan Menteri Pariwisata Reublik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Secara langsung mendelegasikan kewenangan untuk mengatur dan mensinergikan komponen-koponen yang ada dimasyarakat khususnya yang bersinggungan langsung dengan wisata gunung bromo. Artinya bahwa pemerintah diwakili oleh lembaga yang menangani pariwisata harus melakukan pembangunan kantor dan kerangka kerja secara partisipatif dan bebas untuk memenuhi kebutuhan daerah baik opsional maupun esensial dengan tetap fokus pada bagian penguatan dalam melihat potensi, aset dan kelihaihan lingkungan. Dalam pengaturan yang lebih hipotetis yang menyiratkan kerangka kerja yang berkaitan dengan

pariwisata memang merupakan *Nawacita* atau visi-misi pemerintahan Presiden Jokowi pada priode kedua, yang berbunyi; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, artinya sektor pariwisata diharapkan menjadi percontohan perkembangan bagi sektor-sektor lainnya untuk memberikan perbaikan bagi masyarakat di Indonesia.

Dalam upaya membangun pariwisata memang harus disertai dengan pembangunan sarana-prasarana yang bersinggungan langsung dengan objek wisata, tentu pembangunannya harus mempertimbangkan *link and macth* merupakan kunci utama tercapainya suatu pembangunan yang baik, artinya keterkaitan/sinergisitas kebijakan pemerintah pusat dalam hal pembangunan (*top down planning*) dan pemerintah aetah bersifat (*bottom up planning*) sangat diperlukan, adapun dasar sinergi pembangunan nasional adalah harus didasari pada beberapa komponen diantaranya; pertama; membangun wilayah atau objek wisata tanpa melihat wilayah, kedua; memanfaatkan sebesar- besarnya potensi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat.ketiga; pembangunan berbasis bertahap pada sektor usaha baik wisata ataupun usaha lainnya. Memang tekadang sektor pariwisata adalah pilar dalam upaya meningkatkan perdagangan asing untuk perbaikan namun juga siap untuk mengurangi kemiskinan. Area industri perjalanan dapat memberikan hasil yang positif, khususnya;

1. Agar dapat membuka pintu bisnis, dalam hal ini, dengan munculnya wisatawan secara masal, pihak administrasi diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan, keinginan dan asumsi para wisatawan.
2. Dapat meningkatkan posisi terbuka, khususnya dengan membangun kafe dan penginapan serta manor, diperlukan sejumlah besar spesialis ahli di bidang industri perjalanan
3. Dapat menaikkan gaji serta sirkulasi yang adil dari gaji individu. Hal ini disebabkan oleh dampak pengganda yang terjadi dari pengeluaran wisatawan yang cukup besar.
4. Dapat meningkatkan pendapatan retribusi pemerintah dan bea daerah karena setiap wisatawan belanja selalu dibebani oleh pedoman mater
5. Dapat meningkatkan gaji publik atau Total output nasional (GDB)
6. Dapat memberdayakan spekulasi yang diperluas dari bidang industri perjalanan dan bidang keuangan lainnya.
7. Dapat memperkuat keseimbangan angsuran. Jika saldo industri perjalanan mengalami kelebihan maka akan memperkuat keseimbangan cicilan.

Bahkan pengembangan sektor pariwisata juga tidak sembarangan apalagi jika merujuk kepada objek yang dikaji adalah gunung bromo yang menjadi salah satu destinasi prioritas 10 untuk pembangunan pemerintah, tentu harus berdasarkan 3 indikator inti diantaranya;

1. Yang perlu dilihat adalah objek wisata harus memiliki sesuatu yang harus dilihat atau dijadikan pajangan oleh tamu wisatawan. Oleh karena itu, barang tersebut harus memiliki daya tarik tersendiri yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi barang tersebut.
2. Something to do adalah agar wisatawan yang melakukan wisata disana dapat melakukan sesuatu yang berharga untuk memberikan rasa senang, bahagia, santai seperti sarana olah raga, baik itu jungle gym ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari itu tempat untuk membuat wisatawan lebih nyaman untuk tinggal di sana
3. Yang harus dibeli adalah kantor untuk wisatawan belanja yang secara keseluruhan merupakan merek dagang atau simbol daerah sehingga cenderung digunakan sebagai oleh-oleh.

Dengan memperhatikan role model konsep pertahelix yang harus melibatkan bebarapa komponen diantaranya;

1. Akademisi sebagai pengatur dengan strategi, memiliki keterampilan dan lembaga penelitian yang berperan dalam pelaksanaan strategi. Dalam peningkatan industri perjalanan, perguruan tinggi dan lembaga ujian berperan penting dalam membentuk masyarakat berbasis informasi. Batas skolastik untuk membentuk masyarakat dengan memberikan tenaga kerja berbakat yang diharapkan, dengan tujuan agar informasi industri perjalanan dapat tercipta. Merencanakan siswa untuk berpikir secara fundamental

dan memupuk bakat mereka dan menghasilkan informasi dan kemampuan yang kreatif, ambisius dan berwirausaha. Inovasi berperan penting dalam pengembangan berkelanjutan destinasi wisata kedepannya. Akademisi juga berperan sebagai pemantau sebagai pemantau berlaku atau tidak kebijakan pemerintah dalam rangka melakukan pengembangan pariwisata gunung bromo. Sebagai contoh yang dilakukan oleh universitas-universitas negri maupun swasta yang sering melakukan kajian yang berkaitan dengan pariwisata gunung bromo.

2. Bisnis akan bias berjalan dengan banyaknya objek wisata di Gunung Bromo, merupakan peluang bagi masyarakat setempat untuk dapat menggerakkan perekonomian provinsi dengan menjadi pengelola keuangan/pengusaha. Bisnis di bidang industri travel sangat diminati, hal ini dipengaruhi oleh kerjaan web-based entertainment dalam memajukan lokasi-lokasi wisata yang ada. Akibatnya memberikan kesempatan kepada individu untuk melanjutkan pekerjaan di bidang industri perjalanan. Produk bisnis yang dapat dibuat untuk hal ini adalah layanan yang diberikan kepada pelanggan seperti objek wisata sebagai produk pokok yang ditawarkan; transportasi (penyedia tiket kunjungan dan perjalanan, persewaan kendaraan/penyedia transportasi); pendamping lokal (pengusaha dapat memanfaatkan individu di sekitar artikel. Dalam objek bisnis tentu masyarakat bias melihat dan mendapatkan dampak secara langsung, dimulai dari bias membuka usaha atau berjualan, pertumbuhan pendapatan daerah meningkat.
3. Komunitas Aktor lain yang pekerjaan di industri perjalanan adalah daerah setempat (Masyarakat). Jaringan dalam penelitian ini dicirikan sebagai jaringan terdekat dari perspektif yang luas, serta pertemuan yang berbentuk seperti dewan ekspresi teritorial, asosiasi non- legislatif (LSM), atau pertemuan berdasarkan kepentingan atau kepentingan sampingan, yang diharapkan dapat menyelidiki atau memajukan perjalanan. industri di kabupaten. Kelompok masyarakat merupakan salah satu mitra, berperan dalam peningkatan industri perjalanan. Pekerjaan daerah setempat, mulai dari keinginan untuk melakukan kemajuan industri perjalanan di kabupaten. Gagasan Local Area Based The Travel Industry (CBT) mencoba memaknai peran daerah lokal dalam industri perjalanan yang ditetapkan sebagai entertainer utama melalui penguatan, dengan tujuan agar kebutuhan manfaat industri perjalanan dapat terpenuhi. didistribusikan sebanyak yang diharapkan untuk bantuan pemerintah daerah setempat..Dalam hal ini komunitas atau Lembaga Swadaya Masyarakat mendapatkan keuntungan secara ekologi untuk mengawasi dan melihat pertumbuhan pariwisata di gunung bromo, apalagi pada saat ini Indonesia sudah mulai menerapkan konsep *Green economy*
4. Media Massa Komunikasi yang luas adalah penghibur bagi kemajuan industri perjalanan. Komunikasi luas untuk tujuan penyebaran dan korespondensi strategi, serta penghubung antara otoritas publik dan masyarakat. Maraknya media baru yang terus berkreasi sangat membantu kolaborasi sosial antara orang-orang yang maju, terorganisasi dan termekanisasi sebagai dampak dari kompleksitas mekanis, data dan korespondensi.. Artinya intraksi social yang ditimbulkan melau media sosial akan menghasilkan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata.

Sehingga berdasarkan paparan diatas dapat dikategorikan beberapa hal yang menyangkut tentang implementasi pertahelix dalam membangun perkembangan wisata gunung bromo menghasilkan role model sebagai berikut;

Tabel 1. Klasifikasi implementasi pertahelix dalam pengembangan wisata gunung bromo

No	Daerah	Peran	Keterangan
----	--------	-------	------------

	Akademisi	Memberikan pendidikan dengan tujuan terciptanya pariwisata yang berkelanjutan, dan mencerdaskan kehidupan masyarakat agar tumbuh daya kreatifitas yang baik.	Pemberian pendidikan diperlukan bagi masyarakat disekitaran gunung bromo, akan tetapi pada faktanya masih kurang diberikan sehingga jiwa kreatifitas masyarakat masih belum terlaksana dengan efektif.
2.	Bisnis	Membangun usaha untuk dijadikan sebagai pekerjaan sehari-hari masyarakat. Dan dengan memaksimalkan potensi wisata yang ada.	Pembangunan usaha dan bisnis bagi masyarakat sudah berjalan dengan baik
3	Komunitas	Menjadi pengawas ekologi dan pertumbuhan pariwisata agar terciptanya pariwisata yang berkelanjutan.	Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sudah berjalan dengan efektif.
4	Media Massa	Memberikan pemahaman kepada masyarakat baik lokal maupun nasional. Yang berbasis media social.	Pemberian informasi melalui media sosial sudah dilakukan dengan baik

Berdasarkan tabel yang dipaparkan diatas, maka dapat dilihat bahwasanya konsep pertahelix beserta implementasi harus berjalan dengan berkelanjutan semuanya jika ada suatu komponen yang dirasa gagal maka konsep pertahelix tidak akan menghasilkan suatu pariwisata yang baik dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah harus sesuai dengan konsensus masyarakat yang ada di gunung bromo, tujuannya untuk memudahkan dan tidak menimbulkan timpang tindih kebijakan baik kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah dan hukum adat kebiasaan yang berlaku dilapangan. Seperti yang dikatakan oleh swarbroke dalam definisinya tentang pengembangan bahwasanya; Peningkatan industri pariwisata adalah perkembangan upaya untuk mengenali campuran dalam pemanfaatan berbagai aset industri perjalanan yang mengoordinasikan semua jenis sudut pandang di luar industri perjalanan yang secara langsung atau implikasi terkait dengan koherensi industri perjalanan. konsep pertahelix beserta implementasi harus berjalan dengan berkelanjutan semuanya; mulai dari komponen akademisi, bisnis, komunitas dan media massa. bahkan jika ada suatu komponen yang dirasa gagal maka konsep pertahelix tidak akan menghasilkan suatu pariwisata yang baik

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adi Lestari, Noni Suharyati, *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. 2017)
Di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintah FISIP Universitas Sam Ratulangi.
- Edy, Sutrisno. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group 2009) Efiria Soeda, Novie Pioh, Keseda, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata*

- Halibas, A. S., Sibayan, R. O., & Maata, R. L. R. *The penta helix model of innovation in Oman: An hei perspective. Interdisciplinary* (Journal of Information, Knowledge, and Management).
- Inu Kencana, Syafiie.. *Manajemen Pemerintahan*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2011) Ismayanti.. *Pengantar Pariwisata*. (Jakarta: Grasindo. 2011)
- Maturbongs, E., Suwitri, S., Kismartini, K., & Purnaweni, H. *Internalization of Value System in Mineral Materials* (Management Policies Instead of Metal. 2019)
- Peraturan Menteri Pariwisata Reublik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 560
- Putri Rizkiyah, Luyusihana, Herman, *Sinergitas Pentahelix Dalam Pemulihan Pariwisata Pasca Bencana Erupsi gunung Api Sinabung Di Kabupaten Karo, Sumatra Utara*, Jurnal IPTA Vol Nomor. 2 Tahun 2019
- Rujito, Hari. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Model Desa Konserasi dan Ekowisata di Kawasan Taman Nasional Meru Betiri*.
- Sitorus, Ropesta. 2016. Menteri Pariwisata Tekankan Kolaborasi Penta Helix. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160725/12/568877/menteri-pariwisata-tekankan-kolaborasi-penta-helix.-begini-penjelasmnya> Diakses Pada 21 Desember 2022. Pukul: 11:52 WIB.
- Solichin, Wahad. *Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2014
- Suharto, Edi, *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung, Alfabeta.